

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

5.1 Abstraksi

Perencanaan pajak merupakan sebuah usaha dilaksanakan oleh pihak manajemen yang ada di perusahaan supaya beban pajak yang dibayarkan perusahaan tidak banyak, sehingga perusahaan bisa terhindar dari denda atau bunga yang mengakibatkan sebuah keterlambatan pada pelunasan, kurang bayar atau *opportunity loss* akibat terlalu awal dalam pembayaran. Selain itu pada aktifitas dalam sebuah perencanaan pajak itu di bolehkan asalkan tidak melanggar undang-undang di perpajakan yang berlaku. Salah satu pada kendala untuk memaksimalkan sebuah penerimaan pajak yaitu dengan perlawanan yang berupa penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan dengan mengurangi biaya yang dipergunakan dalam usahanya, termasuk pada beban pajak. Peningkatan pada beban pajak bisa mendorong pada perusahaan melakukan cara untuk manajemen pajak supaya pajak yang terbayarkan bisa sedikit. Cara yang di lakukan oleh perusahaan yaitu dengan sebuah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. Jenis peneltiian ini menggunakan Kuantitatif serta Hasil penelitian menunjukkan hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan variabel kontrol leverage. dalam pengambilan sampel menggunakan *purphosive sampling*.

5.2 Tinjauan Teori

Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) *Agency Theory* merupakan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agen* (manajemen perusahaan), dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agen* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. *Agency theory* adalah perspektif dimana secara jelas menunjukkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan pada perusahaan, yakni terdapatnya konflik kepentingan pada perusahaan. Masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan/kepentingan *principal* timbul karena adanya Pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan .

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Brian & Martani (2014) Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak didalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada undang-undang perpajakan, yang bertujuan dapat membayar pajak lebih rendah, hal ini berbeda dengan penggelapan pajak dimana wajib pajak berusaha memperkecil nilai pajak dengan cara yang tidak sesuai undang-undang perpajakan, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal. Sehingga bisa disimpulkan Penghindaran pajak dipergunakan untuk penghematan pajak di perusahaan yang dilakukan dengan memanfaatkan pada ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan yang jalankan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar.

Good Corporate Governance (GCG)

Sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam (Eksandy, 2017) *Good Corporate Governance* merupakan sebuah seperangkat atas peraturan yang bisa mengatur hubungan seperti pihak kreditur, pemegang saham, pemerintah karyawan, pengurus (pengelola) perusahaan, serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya atau bisa juga sebagai pengatur serta pengendalian dari perusahaan. *Good Corporate Governance* sebuah studi yang mempunyai keterkaitan dari hubungan seorang karyawan, direktur, pemegang saham, manajer, kreditur dan pemasok pelanggan terhadap suatu perusahaan serta keterkaitan antar sesamanya. Penelitian ini mempergunakan mekanisme dari *good corporate governance* dilihat dari kepemilikan institusional serta komite audit.

Kepemilikan Institusional

Jensen & Meckling (1976) menunjukkan kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial merupakan sebuah dua mekanisme atas *corporate governance* supaya bisa sebagai pengendalian terkait dengan *problem* keagenan. Kepemilikan institusional merupakan sebuah kepemilikan saham atas institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi luar negeri, institusi keuangan, dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi tersebut mempunyai sebuah wewenang supaya bisa melaksanakan dalam pengawasan terkait dengan kinerja di pihak manajemen. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen.

Komite Audit

Sesuai dengan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (Effendi, 2016:48) definisi dari komite audit merupakan suatu komite yang bisa melakukan pekerjaan dengan profesional serta independen yang pembentukannya dibuat oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya yaitu membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik pada tax avoidance (Diantari dan Ulupui, 2016).

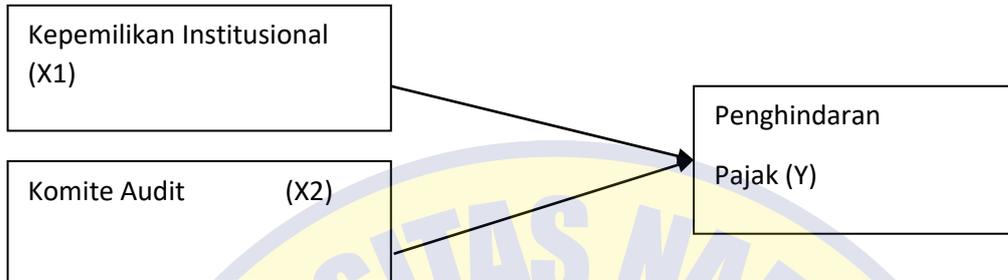
Leverage

Kasmir (2014:113) *leverage* dipergunakan untuk pengukuran terhadap sejauh mana asset dari perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya besarnya terkait dengan jumlah utang yang dipergunakan perusahaan dalam pembiayaan pada kegiatan usahanya jika diperbandingkan dengan modal sendiri. Leverage sebuah rasio keuangan yang menggambarkan setiap hubungan antara utang yang ada di perusahaan pada modal maupun

aset di sebuah perusahaan. Rasio leverage juga memperlihatkan dari risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

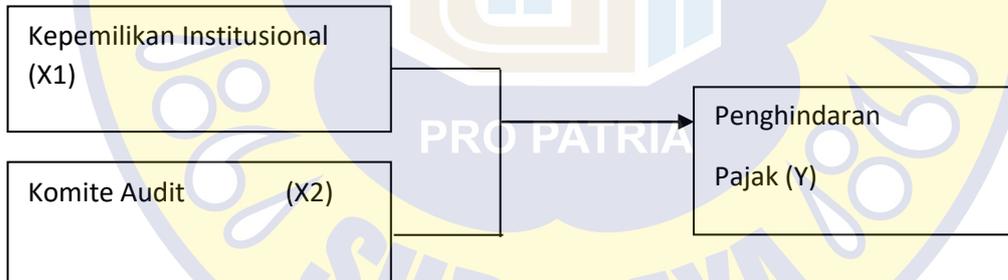
Kerangka Hipotesis

Secara Parsial



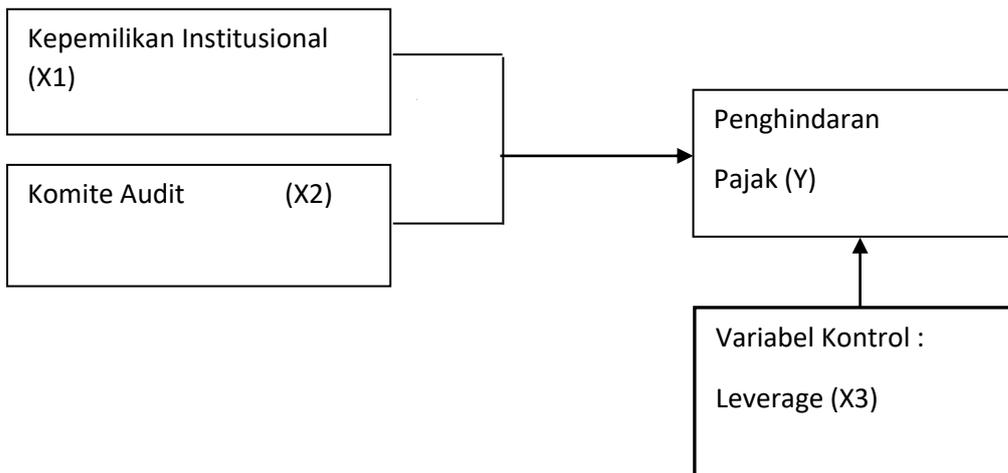
Gambar 1
Kerangka Hipotesis Secara Parsial

Secara Simultan



Gambar 2
Kerangka Hipotesis Secara Simultan

Secara Simultan dengan Variabel Kontrol



Gambar 3

Kerangka Hipotesis Secara Simultan dengan Variabel Kontrol

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Semakin banyaknya kepemilikan institusi keuangan bisa membuat semakin banyaknya kekuatan suara serta dorongan dalam pengawasan dari manajemen yang berakibat dalam pemberian dorongan supaya bisa lebih besar dalam mematuhi peraturan yang ada di perpajakan. Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komite audit bertugas untuk membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik penghindaran pajak. Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Diantari dan Ulupui (2016) didalam penelitiannya menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Peran dari sebuah *Good corporate governance* (GCG) diperlukan oleh perusahaan yang bisa dipergunakan mekanisme atas struktur serta sistem dalam terdorongnya atas

kepatuhan manajemen pada pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan penerapan dari *corporate governance* (CG) berharap memiliki kinerja yang bagus serta efisien. Dengan sebuah penerapan atas *corporate governance* (CG) bisa mempunyai perlindungan secara efektif untuk para investor. Selain itu, penerapan dari *corporate governance* (CG) mempunyai tujuan supaya bisa meminimalisir terkait dengan *problem* dalam keagenan. *Corporate governance* mempunyai andil pada sebuah pengambilan untuk keputusan, terkait dengan pengambilan untuk keputusan terkait dengan pemenuhan dalam kewajiban pajaknya. *Corporate governance* bisa diterapkan secara bagus yang bisa sejalan dengan arti dari pajak yaitu pajak merupakan sebuah kewajiban. Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* dilihat dari kepemilikan institusional dan komite audit. Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukkan Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3: Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik pada *tax avoidance*. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak yaitu leverage, Leverage sebuah rasio keuangan yang menggambarkan setiap hubungan antara utang yang ada di perusahaan pada modal maupun aset di sebuah perusahaan. Penggunaan pinjaman oleh perusahaan akan membuat peningkatan pada beban utang yang bisa timbul pada beban bunga dalam pengurangan dari laba sehingga bisa sebagai pengurangan dari beban pajak yang dibayarkan, maka penghindaran pajak yang sudah teridentifikasi akan bisa terjadi. Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) , Diantari dan Ulupui (2016) dan Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2019) didalam

penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional, komite audit dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: Kepemilikan Institusional dan komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol.

5.3 Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menganalisis secara umum untuk memakai data yang pengukurannya dengan skala numerik (angka) yang diuji dengan analisis statistik (Sugiyono, 2017:7). Penelitian ini memakai data berupa angka dari laporan tahunan pada perusahaan LQ 45 tahun 2016 sampai 2018.

Instrumen Penelitian

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel dan Sumber Data

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 secara keseluruhan di BEI periode 2016-2018. Sampel penelitian ini memakai perusahaan yang listing periode 2016 sampai 2018 LQ45 di BEI. Teknik pengambilan sampel memakai *Purposive Sampling* yang merupakan sebuah teknik pengumpulan sampel dengan cara pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Sumber data penelitian ini memakai data sekunder. Sugiyono (2017:137) data sekunder merupakan data informasinya diperoleh dengan tidak langsung pada perusahaan.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel Dependen

1. Penghindaran Pajak (Y)

Penelitian ini memakai pengukuran Penghindaran pajak dengan memakai CashETR. CashETR yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CashETR (CETR) bisa teridentifikasi pada keagresifan dari tindakan perencanaan pajak yang ada di perusahaan yang dilakukan dengan memakai perbedaan tetap atau bisa juga perbedaan temporer, CETR merupakan perbandingan dari Cash Tax

Paid dengan Pre-Tax Income. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut (Eksandy, 2017).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pre-tax income}}$$

Keterangan :

Cash ETR : Pengukuran penghindaran pajak perusahaan

Cash Taxes Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas (terdapat dalam laporan arus kas perusahaan)

Pre-tax Income : Laba perusahaan sebelum pajak (hanya perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif)

Variabel Independen

1. Kepemilikan Institusional (X1)

Kepemilikan institusional merupakan sebuah kepemilikan saham atas institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi luar negeri, institusi keuangan, dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi tersebut mempunyai sebuah wewenang supaya bisa melaksanakan dalam pengawasan terkait dengan kinerja di pihak manajemen, kepemilikan institusional penelitian ini dihitung dengan memakai rasio kepemilikan saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut (Diantari dan Ulupui, 2016) :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

2. Komite Audit (X2)

Komite audit merupakan suatu komite yang bisa melakukan pekerjaan dengan profesional serta independen yang pembentukannya dibuat oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya yaitu membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut (Diantari dan Ulupui, 2016) :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit diluar Perusahaan}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

Variabel Kontrol

1. Leverage (X3)

leverage dipergunakan untuk pengukuran terhadap sejauh mana asset dari perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya besarnya terkait dengan jumlah utang yang dipergunakan perusahaan dalam pembiayaan pada kegiatan usahanya jika diperbandingkan dengan modal sendiri. Penelitian ini mempergunakan leverage yang diukur melalui *Debt Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) sebuah rasio yang dipergunakan dalam penilaian dari segi utang dengan ekuitas. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2019):

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Equity}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi (Ghozali, 2016:19).

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini memakai uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

Pengujian Secara Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap struktur modal. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$ (0,01), 5% (0,05), 10%(0,10).

Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α	= konstanta
β	= koefisien regresi
Y	= Penghindaran Pajak
X1	= kepemilikan Institusional
X2	= komite audit
X3	= leverage
e	= error

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan menguji sebuah pengaruh dari kepemilikan institusional, komite audit dan leverage terhadap penghindaran pajak, digunakan Uji Kelayakan Model dengan menggunakan taraf signifikan 1% (0,01), 5% (0,05), 10%(0,10).

Uji Koefisien Determinasi

Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, penelitian ini menggunakan adjusted R² berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R² semakin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen.

5.4 Pembahasan Dan Temuan

Uji Analisis Deskriptif

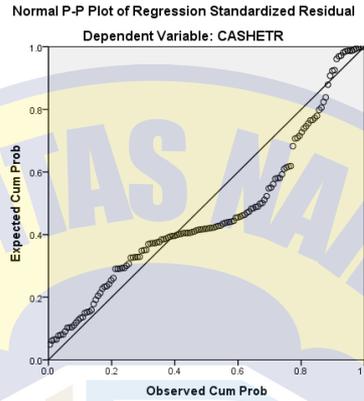
Tabel 1 Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CASHETR	144	.0002	.9882	.269101	.1819770
KI	144	.0000	1.0000	.399300	.3035880
KA	144	.3333	1.0000	.638428	.1395637
LEVERAGE	144	.0872	1320.2807	11.150692	109.8877900
Valid N (listwise)	144				

Statistik deskriptif dipergunakan dari deskripsi data yang didapat dari setiap variabel penelitian. statistik deskriptif mempunyai tujuan pada gambaran terhadap data dengan melihat nilai *mean*, standar deviasi, maksimum, minimum.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Dari hasil penelitian pada gambar 1, maka bisa disimpulkan jika data pada gambar tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

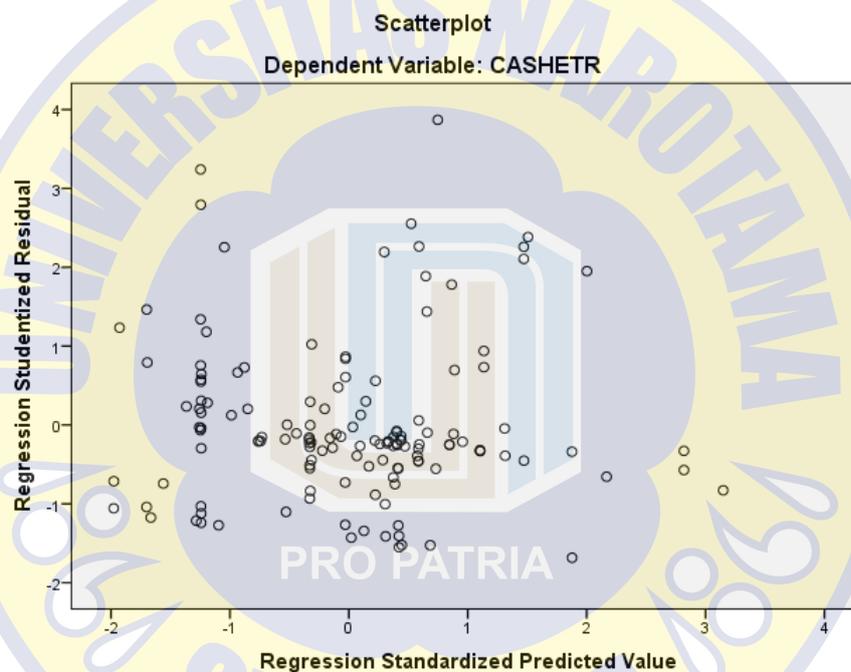
Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	.362	.070	5.134	.000		
	KI	.105	.051	2.060	.041	.937	1.067
	KA	-.210	.111	-1.886	.061	.938	1.066

LEVERA	-0,000062	.000	-.038	-.454	.650	.999	1.001
GE							

a. Dependent Variable: CASHETR

Dari tabel 2 memperoleh hasil setiap variabel mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 di atas diketahui bahwa titik-titik ini menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y jadi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Dusbin-Watson adalah

$0 < DW < dl$: Terjadi *autokorelasi*

$dl \leq DW \leq du$: Tidak dapat disimpulkan

$du < DW < 4-dl$: Tidak ada *autokorelasi*

$4-du \leq DW \leq 4-dl$: Tidak dapat disimpulkan

$4-dl < d < 4$: Terjadi *autokorelasi*

Keterangan :
 DL : Batas bawah DW
 DU : Batas atas DW

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Squared	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change in R Square	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin Watson
1	.210 ^a	.044	.023	.1798296	.044	2.145	3	140	.097	2.085

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, KA, KI
 b. Dependent Variable: CASHETR

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai durbin-watson sebesar 2,430.

DL = 1,685

DU = 1,770

DW = 2,085

Dalam analisis diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,085 hal ini berarti model regresi ini dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi karena nilai $du < DW < 4-dL$ ($1,770 < 2,085 < 2,230$)

Uji Parsial (uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 1%, 5% dan 10% (0,01, 0,05 dan 0,10). Jika $sig < \alpha = 1\%$, 5% dan 10% (0,01, 0,05 dan 0,10) maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika sig

$\alpha = 1\%$, 5% dan 10% (0,01, 0,05 dan 0,10) maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Uji t

Variabel	Nilai Signifikansi Uji t	Hasil Uji t
Kepemilikan Institusional	0,041	Berpengaruh dengan tingkat kepercayaan 5%
Komite Audit	0,061	Berpengaruh dengan tingkat kepercayaan 10%

Analisis Regresi Linear Berganda

Perumusan model regresi linear berganda dengan variabel kontrol dalam penelitian adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Tabel 5 Hasil regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	.362	.070		5.134	.000	
KI	.105	.051	.176	2.060	.041	.937
1 KA	-.210	.111	-.161	-1.886	.061	.938
LEVERA GE	-0,000062	.000	-.038	-.454	.650	.999

a. Dependent Variable: CASHETR

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = 0,362 + 0,105X_1 - 0,210X_2 - 0,000062X_3$$

Perumusan model regresi linear berganda tidak menggunakan variabel kontrol dalam penelitian adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Tabel 6 Hasil regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.362	.070		5.146	.000		
1 KI	.105	.051	.175	2.055	.042	.938	1.066
KA	-.210	.111	-.161	-1.896	.060	.938	1.066

a. Dependent Variable: CASHETR

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y = 0,362 + 1,105X_1 - 0,210X_2$$

Koefisien Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan menggunakan variabel kontrol

Uji F (uji anova) dilakukan untuk meneliti apakah model persamaan regresi yang digunakan adalah linier. Model regresi dianggap baik, jika tingkat signifikan nilai F (anova) kurang dari 1%, 5% dan 10%

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.208	3	.069	2.145	.097 ^b
	Residual	4.527	140	.032		
	Total	4.736	143			

a. Dependent Variable: CASHETR

b. Predictors: (Constant), LEVERAGE, KA, KI

Uji simultan tidak menggunakan variabel kontrol

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.201	2	.101	3.132	.047 ^b
	Residual	4.534	141	.032		
	Total	4.736	143			

a. Dependent Variable: CASHETR

b. Predictors: (Constant), KA, KI

Pembahasan

Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Semakin banyaknya kepemilikan institusi keuangan bisa membuat semakin banyaknya kekuatan suara serta dorongan dalam pengawasan dari manajemen yang berakibat dalam pemberian dorongan supaya bisa lebih besar dalam mematuhi peraturan yang ada di perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit bertugas untuk membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap

perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Diantari dan Ulupui (2016) didalam penelitiannya menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan peran dari sebuah *Good corporate governance* (GCG) diperlukan oleh perusahaan yang bisa dipergunakan mekanisme atas struktur serta sistem dalam terdorongnya atas kepatuhan manajemen pada pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan penerapan dari *corporate governance* (CG) berharap memiliki kinerja yang bagus serta efisien. Dengan sebuah penerapan atas *corporate governance* (CG) bisa mempunyai perlindungan secara efektif untuk para investor. Selain itu, penerapan dari *corporate governance* (CG) mempunyai tujuan supaya bisa meminimalisir terkait dengan *problem* dalam keagenan. *Corporate governance* mempunyai andil pada sebuah pengambilan untuk keputusan, terkait dengan pengambilan untuk keputusan terkait dengan pemenuhan dalam kewajiban pajaknya. *Corporate governance* bisa diterapkan secara bagus yang bisa sejalan dengan arti dari pajak yaitu pajak merupakan sebuah kewajiban. Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* dilihat dari kepemilikan institusional dan komite audit. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukkan Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional dan komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol.

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah

mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik pada tax avoidance. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak yaitu leverage, Leverage sebuah rasio keuangan yang menggambarkan setiap hubungan antara utang yang ada di perusahaan pada modal maupun aset di sebuah perusahaan. Penggunaan pinjaman oleh perusahaan akan membuat peningkatan pada beban utang yang bisa timbul pada beban bunga dalam pengurangan dari laba sehingga bisa sebagai pengurangan dari beban pajak yang dibayarkan, maka penghindaran pajak yang sudah teridentifikasi akan bisa terjadi. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018), Diantari dan Ulupui (2016) dan Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2019) didalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional, komite audit dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.5 Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Saran

1. Penelitian berikutnya hendaknya tidak hanya mempertimbangkan Kepemilikan Institusional dan komite audit sebagai variabel independen, leverage sebagai variabel

kontrol akan tetapi juga menggunakan informasi lainya yang tidak di gunakan dalam penelitian ini seperti profitabilitas, kepemilikan manajerial yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Penelitian berikutnya hendaknya memperluas sampel penelitian yaitu dengan membuat keseluruhan perusahaan di Bursa Efek Indonesia

